

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan Internasional dalam perkembangannya memiliki definisi baik sebagai ilmu atau bidang kaji maupun sebagai fenomena. Fenomena berarti bagaimana Hubungan Internasional merupakan implementasi interaksi antar aktor Hubungan Internasional. Sementara ilmu Hubungan Internasional merupakan bidang kajian ilmu sosial-politik yang mencoba untuk memahami bagaimana pola interaksi yang terjadi antar faktor-faktor yang terlibat dalam fenomena Hubungan Internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, mengkaji Hubungan Internasional tidak terlepas dari fenomena Hubungan Internasional sebagai objek kajian. Senada dengan pendapat dari Robert Jackson dan Georg Sorensen, bahwa Hubungan Internasional merupakan studi perilaku dan konsekuensi hubungan yang dibangun¹.

Kehidupan masyarakat dunia tidak terlepas dari interaksi antar aktor baik itu pada level individu, kelompok, korporasi maupun negara dengan aktor lainnya. Interaksi tersebut akan menjadi semakin intensif manakala ketika persoalan yang dihadapi menjadi semakin kompleks. Kondisi ini akan menjadikan masing-masing aktor lebih membuka diri dengan dunia luar. Ilmu Hubungan Internasional mencoba untuk mengkaji dan menelaah proses interaksi yang terjadi antar aktor-aktor yang ada

¹Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, 1999:2

di dunia. Hubungan internasional sendiri pada dasarnya tercipta karena adanya sikap saling ketergantungan (interdependensi) antar aktor dalam masyarakat internasional²

Interdependensi mendorong para aktor untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Hubungan yang lebih dekat mengindikasikan terciptanya suasana persahabatan yang terjalin baik antara aktor. Namun hubungan yang terjalin baik seringkali dapat berujung pada sikap saling bersebrangan dan menciptakan konflik. Kecendrungan terciptanya konflik muncul sebagai akibat dari pertentangan kepentingan, sikap bermusuhan, dan tindakan militer atau diplomatik dari beberapa aktor tertentu atas suatu masalah³.

Salah satu kawasan yang sarat dengan konflik ialah Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah senantiasa menjadi perhatian publik internasional. Hal ini karena dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah yang selalu mengalami pergerakan. Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan dengan intensitas konflik yang tinggi. Secara garis besar, konflik di kawasan ini dapat dikategorikan menjadi tiga. Kategori pertama, merupakan konflik yang berdimensi religio-ideologis (seperti Libanon). Kedua, konflik yang berdimensi politik-strategis (pertarungan antara kelompok “moderat” vs kelompok “radikal” dikalangan pejuang Palestina dan di dunia Arab secara keseluruhan). Ketiga, konflik yang berdimensi sosio-ekonomis dan

²Anak Agung Bayu Perwita dan Yayan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung.:PT. Remaja Rosda Karya, 2005). H. 2-3

³ K.J Holsti, *Politik Internasional; Kerangka Analisa*, (Jakarta.: Pedoman Ilmu Jaya, 1987), h.592

geo-politis yaitu konflik yang bersumber pada jurang kaya-miskin dan masalah perbatasan (konflik Irak-Kwait, misalnya)⁴.

Hal tersebut disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang terjadi di dalamnya. Masalah yang terjadi di kawasan ini antara lain persoalan perbatasan, latar belakang sejarah, agama, kepentingan nasional, keamanan nasional, dan perimbangan kekuatan. Pemicu utama dari konflik yang terjadi antara negara-negara Timur Tengah dengan Israel adalah masalah pendudukan Israel di tanah Palestina. Masalah yang kemudian sering disebut konflik Israel-Palestina. Hal ini menjadi penting karena selain melibatkan negara-negara kawasan seperti Mesir, Suriah, dan Lebanon, konflik tersebut juga menarik pihak luar kawasan seperti Amerika Serikat. Salah satu konflik yang melibatkan negara lain di luar kawasan Timur Tengah adalah konflik Israel-Hizbullah di Lebanon Selatan.

Konflik yang muncul tidak hanya melibatkan dua entitas negara yang sedang bertikai namun bahkan lebih. Seringkali konflik yang muncul turut di tengah oleh pihak ketiga baik berupa negara lain, organisasi intera di bawah nasional, maupun negara lain yang bernaung di bawah organisasi internasional untuk mendapatkan kesepakatan damai ataupun gencatan senjata. Organisasi internasional menjadi salah satu wadah dari bangsa-bangsa yang ada dalam upaya penyelesaian konflik guna tercapainya perdamaian.

Negara bukanlah seorang arbiter yang mampu berdiri netral (pihak ketiga) tetapi justru menjadi bagian dari pihak yang berkonflik atau pihak kedua (Galtung

⁴Mustafa Abd. Rahman, *Jejak-jejak Pejuang Palestina, Dari Oslo Hingga Intifadh Al Aqsa*, (Jakarta.: Penerbit Buku Kompas, 2002), h. XX

dan Horowitz). Pernyataan Galtung dan Horowitz mengenai ketidakmampuan sebuah negara untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi kemudian menjadi dasar untuk menentukan sebuah kesimpulan bahwa dibutuhkan kehadiran aktor di luar negara tersebut guna menyelesaikan konflik internal yang terjadi. Pihak ketiga atau aktor di luar negara pada dasarnya dipahami sebagai individu atau kolektif yang berada di luar konflik antara dua pihak atau lebih yang dapat membantu mereka mencapai penyelesaian masalah yang berupa kesepakatan atau persetujuan.

Lebih lanjut, tujuan masuknya pihak ketiga adalah untuk menciptakan sebuah situasi konflik yang sebelumnya bersifat destruktif menjadi lebih konstruktif. Selain itu, keterlibatan pihak ketiga bertujuan untuk menurunkan eskalasi konflik yang ada, serta mengalihkan semua pihak yang terlibat dalam konflik menuju ke arah penyelesaian konflik. Dengan kata lain dapat diasumsikan bahwa kehadiran pihak ketiga dalam konflik yang melibatkan dua pihak atau lebih merupakan sebuah hal yang sangat penting.

Indonesia sebagai negara merdeka yang meraih kemerdekaan dengan perjuangan melawan penjajah, Indonesia sejak dahulu hingga sekarang terus berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai kemerdekaan yang dituangkan dalam UUD 45 yang merupakan dasar Negara RI yang berbunyi:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

Dengan merujuk pada nilai-nilai kemerdekaan tersebut Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan mendukung sepenuhnya kemerdekaan bangsa-bangsa

lain yang terjajah. Selanjutnya, dibagian lain pembukaan UUD 45 tercantum komitmen Indonesia terhadap perlindungan nasional maupun dunia internasional, khususnya dalam mendukung terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”

Kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya berpartisipasi aktif dilingkungan internasional yang tersirat dalam pembukaan UUD 45 ini sejalan dengan pemikiran ‘founding father’ Indonesia yakni Moh. Hatta yang kemudian mencetuskan politik luar negeri bebas aktif.

Berpijak pada amanat pembukaan UUD 45 maka Indonesia berperan aktif dalam upaya mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia melalui keikutsertaan dalam misi perdamaian PBB (*United Nations Peacekeeping Operations/UNPKO*) salah satunya dengan mengirim pasukan TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda.

Kontingen Garuda adalah pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai pasukan penjaga perdamaian di mulai pada tahun 1957 ke kawasan Timur Tengah yaitu Mesir. Kiprah Kontingen Garuda sebagai pasukan penjaga perdamaian sejak awal bernaung di bawah payung PBB.

Konflik Israel-Hizbullah yang terjadi pada tahun 2006 adalah serangkaian tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel Utara dan Lebanon selatan

yang melibatkan sayap Hizbullah dan Angkatan Pertahanan Israel (Israel Defence Force atau IDF).

Konflik ini berawal ketika Hizbullah menyerang pasukan Israel yang menyusup ke daerah sekitar Aita al Chab, Lebanon Selatan pada tanggal 12 Juli 2006, dan menawan dua tentara Israel. Tindakan penangkapan ini sejalan dengan rencana Hizbulla yang disebut sebagai *Truthful promise* (Janji yang Jujur) yang bertujuan untuk membebaskan warga Lebanon yang ditawan Israel melalui pertukaraan tawanan. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan serangan Hizbullah ke wilayah Israel yang menewaskan delapan orang tentara Israel serta melukai 20 orang lebih. Israel kemudian membalas dengan Operasi *Just Reward* (Balasan yang Adil). Serangan balasan ini meliputi tembakan roket yang ditujukan ke arah Lebanon dan pengeboman oleh Angkatan Udara Israel (IAF), blokade Udara dan Laut serta beberapa serangan kecil ke wilayah Lebanon Selatan oleh tentara darat IDF⁵.

Israel menyerang Lebanon dengan menggunakan alasan penawanan 2 tentara Israel oleh Hizbullah dalam suatu serangan lintas perbatasan. Hizbullah berencana menggunakan penawanan ini untuk melakukan pertukaran tawanan untuk membebaskan warga Lebanon dan Palestina yang ditahan Israel. Israel membalasnya dengan menyerang Lebanon secara bertubi-tubi. Serangan besar-besaran ini mengagetkan Hizbullah, yang sebelumnya memperkirakan Israel akan membalasnya dengan operasi komando untuk membalas menculik anggota Hizbullah, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Menurut wartawan pemenang Pulitzer, Seymour Hers,

⁵*Konflik Israel Lebanon 2006*, dari Wikipedia bebas bahasa Indonesia di akses dari www.google.com, diakses 28 November 2012.

Israel telah lama mempersiapkan serangan ini atas restu AS, sebagai penjajakan untuk serangan berikutnya ke Iran. Hizbullah membalas dengan kembali meluncurkan roket-roket ke kawasan utara Israel.

Perdana Menteri Israel Ehud Olmert berkata serangan akan dihentikan jika Hizbullah membebaskan 2 tentara Israel. Hizbullah hendaklah menghentikan serangan roket dan pemerintah Lebanon melakukan Ketetapan Majelis Umum PBB 1559, yaitu pelucutan senjata oleh Hizbullah. Israel menuduh Hizbullah telah melancarkan 130 roket dalam waktu 48 jam menyebabkan belasan warga tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Serangan roket Hizbullah ini dilakukan setelah serangan bom Israel ke Lebanon.

Perdana menteri Lebanon Fuad Siniora mengatakan Israel harus mengembalikkan wilayah Sheeba Farms kepada Lebanon sebelum melakukan pelucutan senjata Hizbullah, mengingat penyebab adanya Hizbullah adalah untuk membebaskan Lebanon dari pendudukan Israel. Hizbullah merupakan organisasi Islam Syiah ada yang pro-Suriah dan pro-Iran. Hizbullah mempunyai perwakilan di parlemen Lebanon dan ada yang menjadi menteri Lebanon⁶.

Konflik Israel-Hizbullah yang terjadi di Lebanon mendapatkan perhatian dari PBB. Dewan Keamanan PBB pada 11 Agustus 2006 mengeluarkan Resolusi No. 1701 yang menyatakan perlunya penambahan personil UNIFIL serta penegasan dan penambahan wewenang UNIFIL dalam menangani instabilitas keamanan di Lebanon Selatan.

⁶*Konflik Israel Lebanon 2006*, dari Wikipedia bebas Bahasa Indonesia di akses dari www.google.com, diakses 28 November 2012.

Atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Republik Indonesia dapat ikut serta dalam rangka mewujudkan perdamaian di Lebanon, dan hasil pertemuan konsultasi antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Agustus 2006, mengambil keputusan untuk mengirimkan Kontingen Garuda untuk misi perdamaian di Lebanon. Maka Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 September 2006 mengeluarkan keputusan untuk menetapkan keputusan presiden tentang Kontingen Garuda dalam misi perdamaian di Lebanon.

Dimulai sejak di keluarkannya Resolusi PBB 1701 pada tahun 2006, Indonesia telah berulang kali mengirim TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda (Konga) ke Lebanon Konga XXIII yang disebut Indobatt di bawah misi UNIFIL (United Nation Iterns Force in Lebanon) yaitu Konga XXIII-A hingga XXIII-F 2012 mengalami peningkatan jumlah prajurit yang signifikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mencoba membuat rumusan masalah yaitu: Bagaimana peran Kontingen Garuda dalam penyelesaian konflik Israel-Hizbullah di Lebanon?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk membantu dan mendukung penulis menjelaskan bagaimana peran Kontingen garuda, dan kenapa tetap di pertahankan di Lebanon, maka penulis menggunakan beberapa konsep.

Jika berbicara mengenai Kontingen Garuda di Lebanon tentunya tidak terlepas dengan PBB, mengingat keberadaan Kontingen Garuda di Lebanon berada di bawah payung PBB. Sehingga sebagian besar tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan PBB.

Konsep Diplomasi

Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan yang mendefinisikan diplomasi secara lebih luas:

*"diplomasi merupakan proses keseluruhan yang dilakukan oleh suatu negara dalam melaksanakan hubungan internasional"*⁷

Dengan melihat definisi diatas dapat juga diartikan secara lebih luas dimana sebuah proses diplomasi yang dilakukan sebuah negara tidak hanya melalui sebuah proses negosiasi melainkan keseluruhan tindak tanduk negara dalam melakukan interaksi internasional merupakan sebuah diplomasi. Jika melihat definisi yang disampaikan Martin Griffiths tersebut maka akan menjadi terlihat bahwa segala tindak tanduk negara dalam melakukan hubungan internasional dapat di golongkan sebagai sebuah diplomasi termasuk pengerahan dengan berbagai tujuan seperti operasi militer perang sampai operasi militer non perang.

Dalam kesempatan yang sama, para pakar ini juga menyampaikan bahwa dalam arti sempit diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri suatu negara.

⁷ Martin Griffiths and Terry O'Callaghan: *International Relation*, 2002, hal79.

Adapun tujuan diploamsi, Kautilya menekankan empat tujuan utama diplomasi yaitu⁸:

- a. *Acquisition* (perolehan)
- b. *Preservation* (pemeliharaan)
- c. *Augmentation* (penambahan)
- d. *Proper distribution* (pembagian yang adil)

1. **Diplomasi Preventif**

Diplomasi preventif telah tumbuh dari teknik-teknik baru diplomasi yang berkembang di PBB dikarenakan berbagai sebab. Dalam zaman Perang Dunia II negara-negara lainnya melihat dengan was-was perluasan Perang Dingin dan kecenderungan hegemonistis kedua superpower.

Inis Claude Jr. mengatakan diplomasi preventif dalam kata-kata: *dia merupakan fungsi penetral, untuk dijalankan sejauh mungkin oleh negara-negara yang sikap tidak memihaknya dalam Perang Dingin diimbangi oleh komitmen untuk membuat PBB sebagai penyeimbang hubungan internasional yang efektif dalam era Perang Dingin.*⁹

Latar belakang munculnya diplomasi preventif adalah sebagai bentuk pencegahan konflik yang dianggap bisa menyebar sehingga bisa menimbulkan perang dunia dalam kerangka perang dingin. Namun seiring dengan perkembangan waktu, peran dari diplomasi ini pun mulai dijalankan oleh PBB terhadap konflik yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa cukup besar di suatu negara agar tidak semakin

⁸ S.L Roy ,penerjemah Harwanto dan Mirsawati, *Diplomasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995. Hal 6

⁹ S.L Roy ,penerjemah Harwanto dan Mirsawati, *Diplomasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995. Hal 163.

meluas ke negara lain diluar negara konflik sehingga tidak semakin menimbulkan jatuhnya korban yang lebih banyak lagi.

Definisi diplomasi preventif ini bermacam-macam salah satunya menurut Sekjen PBB, Boutros Ghali, yang secara umum mengandung tiga unsur seperti usaha untuk mencegah pertikaian yang muncul di antara para pihak, usaha untuk mencegah adanya pertikaian yang meningkat menjadi konflik, usaha untuk membatasi meluasnya konflik tersebut apabila hal itu terjadi¹⁰

Michael G.Roskin dan Nicholas O.Berry dalam bukunya *The New World of International Relations*, lebih memandang diplomasi preventif sebagai:

*Upaya-upaya pihak ketiga untuk meredam sengketa sebelum menjadi kekerasan.*¹¹

Adapun tujuan diplomasi preventif yaitu:

1. Mencegah masalah peningkatan konflik dalam dua negara,
2. Mencegah konflik yang berkompetisi menggunakan senjata,
3. Mencegah intensitas geografis konflik meluas hingga terjadi krisis kemanusiaan,
4. Mencegah dan mengelola agar krisis kemanusiaan tidak semakin parah, dan
5. Sebagai bagian dari kondisi krisis guna memberi solusi.

¹⁰Ri2nae Lah, *Peran Diplomasi Preventif Dalam Penyelesaian Konflik* diakses dari <http://ri2naelah.blogspot.com/2010/12/peran-diplomasi-preventif-dalam.html> pada tgl 14 Desember 2012

¹¹Michael G.Roskin dan Nicholas O.Berry, *The New World of International Relations*, diakses dari http://nurul-a-h-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-49501-NEGOSIASI%20DAN%20DIPLOMASI-DIPLOMASI%20PREVENTIF.html pada tanggal 14 Desember 2012.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa perlunya peran pihak ketiga terutama sebagai mediasi dalam penyelesaian konflik yang terjadi diantara dua negara yang sedang bertikai.

Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang, sesuai dengan misi dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam alenia ke IV pembukaan UUD 1945 serta sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang ditegaskan dalam UU No.37 tahun 1999, maka Indonesia berperan aktif dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih guna tercapainya perdamaian dunia.

Kembali meletusnya konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon pada tanggal 12 Juli 2006 yang kemudian lebih dikenal dengan perang 34 hari memakan banyak korban terutama dari pihak Hizbullah yang merupakan warga Lebanon. Berakhirnya perang 34 hari tidak serta merta akan menjadi akhir dari konflik diantara kedua negara karena permasalahan yang muncul bukan hanya pada saat perang terjadi namun juga kerugian yang diakibatkan oleh perang tersebut tentunya membuat kedua negara tidak bisa menerima begitu saja dan tidak menutup kemungkinan akan kembali terjadinya konflik, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mencegahnya.

Untuk mencegah kembali terjadinya konflik antara Israel dan Hizbullah tidak bisa hanya dilakukan oleh kedua negara sehingga dibutuhkan bantuan dari organisasi-organisasi maupun negara lain.

Konflik Israel-Hizbullah yang terjadi di Lebanon tersebut mendapat perhatian dari berbagai negara salah satunya Indonesia. Menimbang prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan

PBB No 1701 dan atas permintaan Sekretaris Jendral PBB serta mengingat amanat UUD, maka Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan No 15 tahun 2006 menetapkan pengiriman pasukan TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda ke Lebanon yang untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB yang diberi nama United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Pengiriman pasukan TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda ke Lebanon merupakan salah satu bentuk realisasi dari cita-cita dan misi perdamaian Indonesia serta sebagai bentuk implementasi dari tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI yang terdapat dalam UU No.34 tahun 2004.

Bergabungnya Kontingen Garuda bersama pasukan PBB yaitu UNIFIL sebagai akibat dari persamaan cita-cita dari Indonesia dengan PBB yang menginginkan terciptanya perdamaian dunia.

Dalam upaya menyelesaikan serta mencegah kembali terjadinya konflik yang terjadi antara Israel-Hizbullah di Lebanon, pasukan perdamaian yang tergabung dalam UNIFIL menjalankan program *Peacekeeping Operation*.

Program yang dijalankan UNIFIL sejalan dengan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI yaitu melaksanakan tugas perdamaian sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

Sejarah *peace-keeping* dimulai dengan pidato bersejarah Lester B. Pearson, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Perdana Menteri (PM) Kanada (1963-1968), di depan Majelis Umum PBB pada 2 November 1956. Pearson menyatakan perlunya di bentuk "*a truly international peace and police*" dalam menjaga kesepakatan gencatan senjata alam krisis Suez saat itu.

Marrack Goulding selaku Sekretaris Jenderal Departemen *Peacekeeping Operation* PBB mendefinisikan *Peacekeeping Operation* sebagai¹²:

“Operasi PBB di lapangan dimana personil internasional, warga sipil atau pemerintah sipil maupun militer, diberikan izin berkelompok dibawah komando PBB untuk membantu mengendalikan dan memecahkan konflik internasional yang nyata terjadi maupun konflik internal yang terjadi serta mempunyai kebebasan internasional”.

*International Peace Academy*¹³ menyatakan bahwa operasi pengawasan perdamaian (*peace-keeping*) dimaksud untuk mengakhiri ketegangan agar tercipta suasana damai dan menciptakan kondisi dimana proses pencapaian perdamaian (*peace-making*) dapat terwujud.

Konflik Israel-Hizbullah yang terjadi di Lebanon tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik namun juga kerusakan non fisik seperti mental masyarakat setempat.

Kontingen Garuda sebagai perwakilan Indonesia dalam menyelesaikan konflik Israel-Hizbullah telah menjalankan *Peacekeeping Operation* melalui berbagai kegiatan yaitu:

- a. Melakukan pembinaan territorial atau yang dikenal dengan *Civil Military Cooperation* (CIMIC) melalui pemberian bantuan kemanusiaan, peningkatan mutu pendidikan, penanganan terhadap trauma perang, dll
- b. Mengawasi pelaksanaan penghentian permusuhan serta operasi penjaga perdamaian melalui berbagai macam patroli.

Doktrin pembinaan territorial yang biasa dilakukan oleh TNI selama bertugas di dalam negeri yang lebih menonjolkan sisi humanis telah menjadi budaya bagi

¹² Ray Murphy, *UN Peacekeeping in Libanon, Somalia, and Kosovo; Operatioanl and Legal Issues in Practice*, (New York,: Cambridge University Press, 2007), h.2

¹³*International Peace Academy, The Peacekeeper Handbook* (New York: International Peace Academy, 1948), h.55

Tenatara Indonesia, hal menjadi modal utama guna mempermudah program-program Kontingen Garuda di terima serta menjadikan mereka lebih dekat dengan masyarakat.

2. Diplomasi Publik

Pengiriman Kontingen Garuda bisa menjadi duta diplomasi publik bagi Indonesia terhadap masyarakat Negara tempat kontingen Garuda bertugas, Paul Sharp berpendapat bahwa Diplomasi publik ialah:

“The process by which direct relations with people in a country are pursued to advance interests and extend the values of those being represented”¹⁴

Dapat di terjemahkan dengan maksud diplomasi publik merupakan suatu proses dimana dilaksanakan hubungan langsung dengan masyarakat di suatu negara guna memperjuangkan kepentingan nasional dan dalam rangka menyebarkan nilai-nilai yang dimilikinya, Anthony Pratkanis memperjelas dengan mendefinisikan diplomasi publik sebagai:

“The promotion of the national interest by informing and influencing the citizen of other nations”¹⁵

Masyarakat Indonesia yang secara tradisi sudah memiliki keramahan alami dan kemampuan untuk menghargai orang lain serta metode penyelesaian konflik secara musyawarah untuk mencapai mufakat, secara natural telah memiliki modal dasar yang kuat untuk melakukan diplomasi publik dan memanfaatkan soft power. Hal ini sangat mendukung kegiatan Kontingen Garuda, karena dalam kesehariannya mereka harus selalu berhadapan dengan masyarakat.

¹⁴

¹⁵ Anthony Pratkanis: Public Diplomacy in International Conflicts, 2009, hal.39

**Tabel 1: Hubungan Antara Situasi, Bentuk, Tujuan, Dan Sarana Diplomasi
Kebudayaan/Diplomasi Publik¹⁶**

SITUASI	BENTUK	TUJUAN	SARANA
DAMAI	-Eksibisi -Kompetisi -Pertukaran Missi -Negosiasi -Konferensi	-Pengakuan -Hegemoni -Persahabatan -Penyesuaian	-Pariwisata -Olahraga -Pendidikan -Perdagangan -Kesenian
KRISI	-Propaganda -Pertukaran Missi -Negosiasi	-Persuasi -Penyesuaian -Pengakuan -Ancaman	-Politik -Mass Media -Diplomatik -Missi tingkat Tinggi Opini Publik
KONFLIK	-Terror -Penetrasi -Pertukaran Missi -Baikot -Negosiasi	-Ancaman -Subversi -Persuasi -Pengakuan	-Opini Publik -Perdagangan -Para Militer -Forum Resmi -Pihak Ketiga
PERANG	-Kompetisi -Terror -Penetrasi -Propaganda -Embargo -Boikot -Blokade	-Dominasi -Hegemoni -Ancaman -Subversi -Pengakuan -Penaklukan	-Militer -Para Militer -Penyelundupan -Opini Publik -Perdagangan -Supply Barang Konsumtif (termasuk senjata)

Sumber: Buku Diplomasi Kebudayaan: Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari. *Konsep dan Relevansi Negara Berkembang Studi Kasus Indonesia*

Mengacu kepada tabel diatas, metode diplomasi yang digunakan Kontingen Garuda dalam konflik Lebanon yang lebih cenderung menerapkan diplomasi publik merupakan sebuah tindakan yang tepat, dimana ketika terjadi konflik selain menggunakan kekuatan fisik berupa penetrasin, mempengaruhi langsung kepada individunya dapat dilakukan seperti dengan melakukan persuasi.

¹⁶ Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang Studi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2007).hal.31

Program bersifat pro-aktif yang di terapkan oleh Indonesia di Lebanon bisa menjadi satu proses yang positif terhadap masyarakat Lebanon di samping itu kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh Kontingen Garuda di Lebanon juga mendukung kebijakan CIMIC yang di terapkan oleh UNIFIL.

Keberhasilan para prajurit dalam membina hubungan baik dengan masyarakat setempat, pada akhirnya membuahkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan operasional mereka, serta menumbuhkan rasa cinta masyarakat setempat terhadap para prajurit.

Jika melihat pola-pola yang digunakan oleh para prajurit Indobatt, maka tampak bahwa para prajurit Indobatt telah menerapkan prinsip-prinsip diplomasi publik dengan menggunakan soft power berupa kemampuan untuk melakukan pendekatan dengan seluruh komponen dalam masyarakat dalam rangka memenangkan *hearts and minds of people*. Hasil dari Kontingen Garuda tersebut adalah munculnya kepercayaan dari publik Lebanon kepada Kontingen Garuda khususnya, dan kepada Indonesia pada umumnya. Bahkan mereka menginginkan agar beberapa wilayah operasi negara anggota UNIFIL lainnya dijadikan sebagai wilayah operasi Indobatt. Pihak PBB melalui UNIFIL juga mengakui keberhasilan diplomasi publik yang dilakukan oleh para prajurit Indobatt.

Hal ini ditunjukkan dengan pemberian bantuan dari UNIFIL yang diberikan melalui Indobatt. Selain itu pasukan Indobatt juga beberapa kali dilibatkan oleh UNIFIL dalam menyelesaikan konflik yang muncul antara Kontingen UNIFIL lain dengan masyarakat sekitar. Indobatt berhasil menjalankan kepercayaan yang

diberikan secara maksimal, dan mampu menjadi mediator antara masyarakat dengan UNIFIL.

Dengan demikian keberadaan Kontingen Garuda mendapat pengakuan serta dapat di pandang oleh kontingen dari negara lain, pemerintah setempat, dan UNIFIL memiliki peran yang signifikan dalam upaya penyelesaian konflik, sehingga keberadaannya tetap dibutuhkan.

D. Hipotesis

Dari uraian di atas serta didukung oleh beberapa kerangka dasar pemikiran maka penulis dapat mengambil kesimpulan sementara sebagai jawaban dari rumusan masalah di atas yaitu Peran Kontingen Garuda yang berada di Lebanon adalah sebagai media diplomasi Indonesia melalui:

- a. Program pembinaan teritorial/wilayah yang dikenal dengan *Civil Military Cooperation (CIMIC)* guna memulihkan kondisi setempat baik mental, keterampilan dan fisik.
- b. Program operasi pasukan penjaga wilayah yaitu prajurit profesional yang tugasnya utamanya menjaga perdamaian di wilayah Lebanon selatan khususnya dengan melakukan berbagai patroli guna meredam timbulnya konflik dan mengupayakan terciptanya serta terpeliharanya perdamaian yang abadi pasca konflik antara Israel dengan kelompok Hezbollah di wilayah Lebanon.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sekunder, artinya penulis menggunakan metode penelitian bersifat Library Research atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, artikel, surat kabar, majalah, internet serta berbagai media lain yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

Adapun metode penulisan yang akan penulis gunakan adalah deskriptif dan argumentative, sehingga penulis dapat menggambarkan dan menjawab pokok permasalahan yang telah diajukan penulis.

F. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitaian dan penulisa skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana politik luar negeri Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia
2. Untuk mengetahui bagaimana Kontingen Garuda yang berada di Libanon sejak 2006 sampai dengan tahun 2010 berperan sebagai media diplomasi dalam upaya perdamaian atas konflik yang terjadi antara Hizbullah dan Israel dalam perang yang dikenal dengan nama perang 34 hari.
3. Untuk mengetahui bagaimana jalannya perang 34 hari yang terjadi antara Hizbullah dan Israel.
4. Sebagai perwujudan dari teori-teori yang diperoleh penulis selama dibangku kuliah, yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan serta membuktikan hipotesa yang dibuat penulis.

5. Untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Pembatasan penelitian yang dilakukan dalam menyusun sebuah karya ilmiah dalam hal ini skripsi dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi lebih jelas dan spesifik, serta agar dalam pembahasan dan pengkajian pokok permasalahan dari skripsi ini tidak terjadi penyimpangan.

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan menghindari kesulitan dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan batasan, kontingen Garuda yang dijadikan sebagai media diplomasi oleh Indonesia ini akan membahas seputar kontingen Garuda sebagai media diplomasi Indonesia yang berada di Libanon yang dimulai sejak tahun 2006 s/d tahun 2010. Dengan alasan bahwa tahun 2006 merupakan awal diutusnya kontingen Garuda ke Libanon dalam rangka ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia

Adapun apabila terdapat pembahasan mengenai masalah-masalah yang berada diluar jangkauan pokok permasalahan dan diluar jangkauan waktu yang ditetapkan, selama masih ada korelasi dan relevansi akan penulis cantumkan dengan maksud sebagai tinjauan historis dan sebagai data pendukung dalam menjelaskan uraian pokok permasalahan yang dimaksud dalam skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi kedalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan yang yang diajukan penulis dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan antara pembahasan yang satu dengan lainnya menuju pokok permasalahan, maka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB. I

Merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB. II

.Menjelaskan tentang konflik yang terjadi antara Hizbullah dan Israel tepatnya di kawasan selatan Lebanon yang merupakan basis Hizbullah dan berbatsan langsung dengan negara Israel. Bab ini akan terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas beberapa hal yang terkait dengan konflik tersebut. Pertama, akan membahas perang 34 hari. Kedua, akan membahsa tentang kehadiran PBB/UNIFIL dalam konflik Lebanon tersebut.

BAB. III

Menjelaskan tentang peran Kontingen Garuda dalam menyelesaikan konflik antara Israel dengan Hizbullah yang terjadi di Lebanon tersebut. Bab ini akan terdiri dari dua sub-bab, sub-bab yang pertama akan membahas tentang kebijakan/peran Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian. Kedua, akan menjelaskan tentang Kontingen Garuda sebagai media Diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan konflik

Lebanon atau yang lebih dikenal dengan perang 34 hari, termasuk bagaimana peran atau kegiatan yang dilakukan oleh Kontingen Garuda yang berada di Lebanon.

BAB. IV

Bab IV merupakan bagian Penutup dari Skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dari masing bab yang ada dalam skripsi ini.